

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di apotek Pro-Tha Farma adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan membekali diri dengan pengetahuan terkait pelayanan kefarmasian di apotek, peraturan tentang apotek, manajemen pengelolaan apotek, serta pengetahuan tentang obat dan penggunaannya.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan agar meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pasien dalam melakukan KIE, sehingga informasi yang disampaikan dengan tepat dan baik.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.
4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga mampu melakukan kegiatan di apotek dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS Drug Information, 2011, Bethesda: American Society of Health System Pharmacist, (Electronic Version).
- Anonim, 2014, Info BPJS Kesehatan Edisi VI tahun 2014, Media Internal Resmi BPJS Kesehatan, Jakarta, Indonesia.
- British Medical Association, 2011, British National Formulary, 61th ed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Depkes RI., 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 992/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.
- Depkes RI., 2006, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Depkes RI., 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Depkes RI., 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta.
- Depkes RI., 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Depkes RI., 2011, Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jakarta.
- Depkes RI., 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Depkes RI., 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta
- Depkes RI., 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Jakarta.

- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Seto S., Nita Y., Triana L., 2015, Manajemen Farmasi, ed 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London.
- Pramudianto & Evaria, 2012, MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi, ed. 13, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Pengurus Daerah IAI – Jawa Timur, 2010. *Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian. Surabaya.*